

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan bagi negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi tidak hanya tertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, keamanan, serta kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan hidup. Khususnya pembangunan ekonomi, diperlukan kebijakan yang kondusif agar tercapai peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahun sesuai dengan yang ditargetkan.

Keberhasilan pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang dimiliki oleh masing-masing negara, antara lain sistem ekonomi, ketersediaan sumber daya, teknologi, efisiensi, budaya, kualitas manusia dan kualitas birokrasi. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara akan menentukan seberapa besar peran pemerintah dalam proses pembangunan dan pola kebijakan yang dilakukan. Dalam konsep ekonomi dikenal dua kebijakan ekonomi yang utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan pengendalian sektor moneter, sedangkan kebijakan fiskal merupakan pengelolaan anggaran pemerintah (*budget*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan (Rosit, 2010).

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, menjadi subyek penting untuk dianalisis dan diperdebatkan. Kontroversi utama adalah dapatkan sektor publik dapat menaikkan dalam jangka panjang tingkat

pertumbuhan ekonomi (*long run steady state growth economy*). Secara umum gambaran pengeluaran publik, yaitu infrastruktur fisik (*human capita*) dapat mempertinggi pertumbuhan tetapi keuangan khususnya pengeluaran dapat memperlambat pertumbuhan (*because of disincentif effect*). Secara umum dampaknya tergantung dari *trade-off* antara pengeluaran publik yang produktif dan *effects* pajak yang bersifat distorsif (*disrtortionary*) (Sodik 2007).

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama bagi negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi tidak hanya tertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, keamanan, serta kualitas sumberdaya termasuk sumberdaya manusia dan lingkungan hidup (K. Anwar 2014).

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dilihat dari tingkat pendapatan nasional dan tingkat output produksi yang meningkat. Bentuk pendapatan nasional bisa dilihat pada seberapa besar GNP (*Gross Nasional Product*) dan GDP (*Gross Domestic Product*).

Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut dihubungkan dengan adanya perkembangan dari tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya karena sebagai simbol untuk mengukur presentase perubahan pendapatan nasional (Sukirno, 2006).

Pembangunan mengharuskan pemerintah memilih berbagai cara untuk mengoptimalkan keadaan ekonomi di dalam keadaan sumber daya yang terbatas.

Untuk hal tersebut maka pemerintah perlu menjalankan fungsinya dalam pembangunan sebagai motivator sampai sebagai regulator. Setiap keputusan pemerintah adalah untuk memaksimalkan keadaan ekonomi. Banyak pendapat dan teori yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Teori tersebut dapat dibagi dalam tiga aliran besar, yaitu klasik, neoklasik, dan modern (*struktural*). Tokoh yang sangat berpengaruh dalam memberikan kontribusi mahzab klasik adalah Adam Smith dan David Ricardo.

Berdasarkan pandangan ahli ekonomi klasik, terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu, jumlah penduduk, kekayaan alam, tingkat teknologi dan keterbukaan ekonomi. Mahzab neoklasik mempunyai pemeran utama yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Harrod-Domar melihat pengaruh investasi dalam perspektif waktu yang panjang (Muhammad,2013).

Investasi akan memberikan pengaruh pada permintaan agregat dan penawaran agregat dalam jangka waktu yang panjang. Semakin besar investasi yang ada dalam suatu negara, maka semakin besar pula pertumbuhan ekonominya. Menurut teori pertumbuhan modern, faktor yang berperan penting bukan hanya masalah kapital, atau investasi yang besar (Tambunan,2001).

Kondisi makro ekonomi ditunjukkan oleh berbagai perkembangan data makro ekonomi akibat penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal dan moneter. Dinamika perkembangan kebijakan fiskal dapat dilihat dari pendapatan dan belanja pemerintah. Selain itu ada pengaruh kebijakan moneter yang mengatur persediaan uang, supaya uang yang beredar dapat

terkendali dan pada kondisi ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat (Sriyana, 2012).

Pada kebijakan fiskal memiliki pengertian bahwa kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini memiliki kontrol lebih dalam mengatur perusahaan-perusahaan swasta yang terdapat di negara Indonesia karena tindakan pemerintah dalam bentuk peningkatan pajak atau penurunan pajak dapat mempengaruhi jumlah *output* yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat pajak yang dikenakan maka produksi akan dikurangi dan memungkinkan harga produk tersebut akan meningkat begitu pula sebaliknya. Dapat disimpulkan ketika adanya kenaikan pajak dan penurunan belanja pemerintah akan mengakibatkan penurunan pendapatan nasional, sedangkan dalam penurunan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah akan mendorong pendapatan nasional dan investasi yang lebih tinggi dari sebelumnya (Sriyana, 2012).

Kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam menggerakkan aktifitas ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, pemerataan pendapatan. Akan tetapi, dampak kebijakan fiskal pada aktifitas ekonomi negara sangatlah luas. Berbagai indikator ekonomi lainnya pun mengalami perubahan sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Dampak kebijakan fiskal pada pertumbuhan ekonomi diharapkan selalu positif, sedangkan dampak pada inflasi diharapkan selalu negatif. Akan tetapi secara teori, kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah tanpa terjadinya peningkatan sumber

pajak, sebagai sumber keuangan utama pemerintah, akan mengakibatkan peningkatan defisit anggaran (Jaka Sriyana, 2007).

Peranan kebijakan fiskal dalam menstimulasi perekonomian menjadi perdebatan yang menghangat kembali, khususnya sejak krisis ekonomi melanda Negara-negara Asia seperti Indonesia, Korea, Thailand, dan Filipina, berlanjutnya resesi di Jepang, dan melemahnya perekonomian Amerika Serikat. Di Negara-negara Asia yang dilanda krisis pada khususnya, peranan kebijakan fiskal telah meningkat dalam mendukung pemulihan ekonomi, namun efektifitas stimulus fiskal untuk menggantikan pengeluaran swasta tetap dipertanyakan. Sebagaimana negara membangun, pada umumnya, kebijakan fiskal yang dilaksanakan Indonesia adalah kebijakan fiskal ekspansif dengan instrumen anggaran defisit (Jaka Sriyana, 2007).

Pada dasarnya kebijakan fiskal yang ekspansif dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak kelonggaran dana ke dalam masyarakat untuk mendorong perekonomian. Akan tetapi, kebijakan fiskal seringkali menjadi kurang efektif jika tidak didukung oleh situasi dan kondisi yang tepat serta kebijakan lain yang konsisten, bahkan tidak mustahil kebijakan stimulus fiskal justru dapat menghambat laju perekonomian. Misalkan, stimulus fiskal yang semestinya akan meningkatkan *aggregate demand*, namun bila tidak diimbangi kebijakan moneter yang akomodatif, justru dapat menyebabkan hasil yang kontra produktif (Anggito Abimanyu, 2003).

Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan *agregat demand*, pada akhirnya terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi, jika tidak hati-hati maka akan

timbul inflasi. Selama ini Indonesia cenderung melakukan kebijakan fiskal yang ditunjukkan untuk mendorong perekonomian yang biasa dikenal dengan kebijakan anggaran yang longgar (*loose budget policy*), yang intinya berupa kenaikan rasio anggaran negara terhadap pendapatan nasional yang berupa kenaikan defisit anggaran atau penurunan surplus anggaran (Anggito Abimanyu, 2003).

Kebijakan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah kebijakan dalam melakukan defisit anggaran karena Indonesia perlu untuk membangun perekonomian yang lebih baik agar pendapatan nasional dan output produksi semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik. Namun, pada kebijakan defisit anggaran ini secara tahapan akan mempengaruhi pada APBN yang semakin tinggi angka defisitnya dan langkah yang dilakukan pemerintah adalah berhutang pada luar negeri. Dalam utang luar negeri memiliki tingkat bunga yang dalam dari tahun ke tahun. Jumlah utang tersebut akan semakin meningkat dan menambah utang negara jika tidak cepat-cepat dilakukan pembayaran dengan cepat. Kebijakan ini dapat dilihat dari tabel defisit anggaran. Berikut ini merupakan tabel defisit anggaran dari tahun 2000-2017:

**Tabel 1.1 Tingkat Defisit Anggaran di Indonesia tahun 2000-2017
(Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Negara	Pengeluaran Negara	Defisit Anggaran
2000	152,896.5	197,030.3	44,133.8
2001	263,226.6	315,756.1	52,529.5
2002	301,874.3	344,008.7	42,134.5
2003	336,155.5	370,591.8	34,436.3
2004	349,933.7	374,351.2	24,417.5
2005	380,377.1	397,769.4	17,392.3
2006	625,237.0	647,667.8	22,430.8
2007	723,057.9	763,570.8	40,512.9
2008	781,354.1	854,660.2	73,306.1
2009	985,725.3	1,037,067.3	51,342.0
2010	949,656.1	1,047,666.0	98,009.9
2011	1,104,902.0	1,229,558.5	124,656.5
2012	1,311,386.7	1,435,406.7	124,020.0
2013	1,529,673.1	1,683,011.1	153,338.0
2014	1,667,140.8	1,842,495.3	175,354.5
2015	1,793,588.9	2,039,483.6	245,894.7
2016	1,822,545.9	2,095,724.7	273,178.8
2017	1,750,283.4	2,080,451.2	330.167.8

Sumber : Kementerian Keuangan (2000-2017)

Pada tabel 1.1 menampilkan sebuah data yang menunjukkan perkembangan defisit anggaran dari tahun 2000-2017. Pada tabel 1.1 ini terdapat adanya naik turun dalam kurun dari tiap tahunnya. Tingkat defisit anggaran yang terendah pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp.17,392.3 Miliar, yang tertinggi adalah ditahun 2017 yang mencapai Rp.330,167.8 Miliar. Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tabel ini menunjukkan fluktuasi angka defisit anggaran dari tahun 2000-2017. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2001-2005 defisit anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dari Rp.52,529.5 Miliar turun menjadi Rp.17,392.3 Miliar Pada tahun 2003-2005. Perkembangan defisit anggaran di Indonesia dinamis, dapat dilihat dari tahun 2000-2005 titik terendah terdapat di tahun 2005.

Pada tahun 2005-2012 fluktuasi pergerakan angka defisit anggaran relatif stabil, karena jarak pengeluaran pemerintah tidak begitu signifikan. Keadaan fluktuasi yang tertinggi terjadi ketika tahun 2012-2017, pada tahun 2017 angka defisit anggaran Indonesia mencapai nilai Rp330,167.8 Miliar yang terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Keadaan defisit negara yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan akan memperparah kondisi keuangan dalam APBN.

Isu strategi pembiayaan defisit anggaran mendapatkan perhatian yang cukup luas dalam kebijakan makroekonomi sebagai program kebijakan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Mengapa ini penting karena disetiap negara baik negara maju seperti AS, UK, Jerman, Jepang, Italia, bahkan Cina, Spanyol, Korea, maupun terlebih negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia akan mengalami persoalan defisit anggaran. Tetapi masing-masing negara memiliki strategi untuk melakukan pembiayaan defisit anggarannya dengan baik, agar pengelolaan pembiayaan bisa optimal (Soebagyo 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Defisit Anggaran di Indonesia Pada Tahun 1998-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap defisit anggaran di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh ekspor terhadap defisit anggaran di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh impor terhadap defisit anggaran di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh utang luar negeri terhadap defisit anggaran di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh nilai tukar terhadap defisit anggaran di Indonesia.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh ekspor terhadap defisit anggaran di Indonesia.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh impor terhadap defisit anggaran di Indonesia.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang luar negeri Terhadap defisit anggaran di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi salah satu syarat wajib yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan studi dan sebagai syarat kelulusan. Manfaat lain adalah menambah

ilmu pengetahuan mengenai sistem anggaran kenapa melakukan kebijakan defisit anggaran ataupun surplus anggaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan dapat memahami tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang setiap kebijakannya memiliki alasan tersendiri.

2. Bagi Instansi yang Terkait

Diharapkan bisa menambah wawasan bagi pihak instansi yang terkait dengan penelitian ini, supaya adanya perkembangan ekonomi yang meningkat di negara Indonesia dengan pemanfaatan anggaran yang ada dan evaluasi dalam pembentukan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat untuk masa kini dan masa depan.